

PERKEMBANGAN PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

**Hilma Wati¹, Kartini Linda Sari², Maspiah^{3*}, Halimah⁴, Lisna Ayu Novita⁵,
Junaidi⁶, Muhammad Sahruraji⁷**

¹⁻⁷ Program Studi PGSD Universitas Sapta Mandiri Balangan

e-mail : maspiah@gmail.com

Abstrak : Artikel ini membahas peran Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dengan fokus pada bagaimana Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi negara yang mengarah pada pemersatu bangsa yang majemuk. Sejak pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi pijakan dalam pembentukan struktur negara Indonesia dan perkembangan identitas nasional. Dalam kajian sejarah, Pancasila tidak hanya dilihat sebagai hasil dari diskusi filosofis para pendiri bangsa, tetapi juga sebagai refleksi dari pengalaman sejarah panjang Indonesia yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengakomodasi pluralitas dan keberagaman Indonesia. Artikel ini juga mengkaji perkembangan penerapan Pancasila dalam berbagai fase sejarah, baik dalam konteks perjuangan kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, maupun masa reformasi. Tantangan dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sorotan utama, dengan harapan agar nilai-nilai Pancasila dapat terus relevan dan menjadi dasar dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kata Kunci: Pancasila; Sejarah Indonesia; Ideologi Negara, Identitas Nasional; Pluralisme; Penerapan

Abstract : This article discusses the role of Pancasila in the study of the history of the Indonesian nation, with a focus on how Pancasila functions as the basis of state ideology which leads to unifying a diverse nation. Since it was first ratified on August 18 1945, Pancasila has become a cornerstone in the formation of the Indonesian state structure and the development of national identity. In historical studies, Pancasila is not only seen as the result of the philosophical discussions of the nation's founders, but also as a reflection of Indonesia's long historical experience which is full of social, political and cultural dynamics. The five principles contained in Pancasila reflect noble values that accommodate Indonesia's plurality and diversity. This article also examines the development of the application of Pancasila in various historical phases, both in the context of the independence struggle, the Old Order, the New Order, and the reform period. The challenges and implementation of Pancasila in national and state life are the main focus, with the hope that Pancasila values can continue to be relevant and become the basis for building a better future for Indonesia.

Keywords: Pancasila; Indonesian History; State Ideology; National Identity; Pluralism, Implementation

PENDAHULUAN

Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang

berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu pancasila.

Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia. Makalah ini akan membahas tentang pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.

Sampai saat ini, hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan yang mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya yang menjadi sejarah Pancasila yang ada seperti. Dalam Kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari lima poin. Kelima poin tersebut meliputi: dilarang melakukan kekerasan, dilarabf mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras.

Di dalam Kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa “Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Magrwa”. Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapatih Gajah Mada.

Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi Bangsa Indonesia, seperti Soekarno dan H.O.S Cokroaminoto. Namun beberapa literatur yang ada tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi Soekarno lah yang berpendapat paling lantang untuk menyuarakan Pancasila hingga Pancasila dikenal seperti sekarang ini.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan sejarah, budaya, politik, dan pemikiran bangsa Indonesia. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat, serta bagaimana setiap sila Pancasila memiliki akar dan makna yang mendalam.

Pada era reformasi, nilai-nilai Pancasila kembali diaktualisasikan melalui pidato-pidato tokoh politik, seperti BJ Habibie. Habibie menegaskan bahwa Pancasila harus tetap relevan dalam menghadapi dinamika global dan perubahan sosial. Ia mengemukakan perlunya reaktualisasi Pancasila agar sesuai dengan tantangan baru yang dihadapi bangsa, seperti globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan sosial yang cepat. Reaktualisasi ini bertujuan untuk memperkuat paham kebangsaan dan menjaga integritas bangsa di tengah tantangan modern.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pastinya ada pedoman yang menuntun di dalam berperilaku dan bertindak. Seperti halnya pada masyarakat di Indonesia, ada Konsensus Nasional yang dipakai sebagai pedoman dan dasar berbangsa dan bernegara. Konsensus Nasional berasal dari dua kata yaitu “konsensus” yang berarti kesepakatan atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara, dan “nasional” yang berarti

bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Jadi, Konsensus Nasional adalah pedoman yang merupakan hasil dari kesepakatan atau telah disetujui secara bersama-sama untuk dipakai sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku.

Bangsa Indonesia sendiri memiliki empat Konsensus Nasional dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kesempatan kali ini, akan saya bahas mengenai salah satunya yaitu Pancasila. Pancasila merupakan salah satu bagian terpenting dalam Konsensus Nasional karena mencakup juga sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, berarti menjadi fondasi yang menyangga bangsa Indonesia agar tetap berdiri kokoh di tengah guncangan dari dalam maupun dari luar.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memahami peran dan perkembangan Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia dari masa ke masa. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen sejarah seperti teks-teks proklamasi, keputusan-keputusan resmi, pidato-pidato penting para tokoh bangsa, serta literatur-literatur sejarah yang mengkaji perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis terhadap karya-karya ilmiah dan buku-buku yang membahas Pancasila dalam berbagai perspektif, baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya.

Dalam analisisnya, penulis mengkaji hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan peristiwa sejarah yang membentuk bangsa Indonesia, serta penerapan ideologi Pancasila dalam berbagai periode pemerintahan, dari masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis teks dan konteks, dengan fokus pada pemahaman bagaimana Pancasila diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan perkembangan pemikiran para pendiri bangsa, yang digali dari arsip-arsip sejarah dan berbagai sumber sekunder yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya Pancasila Sebagai Dasar Negara

Memahami dinamika perubahan susunan sila Pancasila termasuk ke dalam upaya untuk memahami sejarah Pancasila. Bangsa Indonesia yang peduli terhadap pandangan hidup serta dasar negara kita seharusnya mendalami materi sejarah Pancasila yang dulunya berliku-liku hingga menciptakan Pancasila yang sangat ideal bagi Bangsa Indonesia ini

Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila. Anda tentunya sudah sering mendengar istilah kepanitiaan yang terbentuk pada saat itu, seperti BPUPKI, PPKI, dan Panitia Sembilan.

1. Pembentukan BPUPKI (29 April 1946)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Radjiman Widjodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945).

a. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Mohammad Yamin yang merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia, mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPUPKI yang pertama, diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Setelah itu, beliau juga mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan UUD Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia.
- 3) Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Soepomo (31 Mei 1945)

Dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Soepomo antara lain:

- 1) Paham Persatuan.
- 2) Perhubungan Negara dan Agama.
- 3) Sistem Badan Permusyawaratan.
- 4) Sosialisasi Negara.
- 5) Hubungan antar Bangsa yang Besifat Asia Timur Raya.

c. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada sidang BPUPKI yang pertama ini, Soekarno juga mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin. Dan kemudian dinamakan dengan Pancasila yang meliputi:

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- 3) Mufakat atau Demokrasi
- 4) Kesejahteraan Sosial
- 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan

Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia Sembilan.

2. Panitia Sembilan (22 Juni 1945)

Panitia yang beranggotakan sembilan orang ini berhasil merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta:

- a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusaywaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Sidang BPUPKI II(10-16 Juli 1945)

Untuk membahas hasil kerja panitia sembilan, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan, yang meliputi: pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara Republik, hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka (Hasil kesepakatan 39 suara). Dan yang terakhir, pembentukan tiga panitia kecil sebagai: Panitia Perancang UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembela Tanah Air.

Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Sidang PPKI (18 Agustus 1945)

Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga Pancasila menjadi:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusaywaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penghapusan sembilan kata dari sila pertama tersebut sering menjadi isu yang kontroversial pada saat itu, bahkan hingga kini. Namun yang harus kita tanamkan dan catat untuk diri masing-masing dari materi sejarah Pancasila ini, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Seharusnya apabila kita meresapi sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, segala permasalahan yang menyangkut dengan sila pertama tidak harus dan tidak patut untuk terjadi lagi. Karena hal tersebut akan bertentangan dengan Pancasila.

5. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968

Semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan, pembacaan atau pun pengucapannya. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut, Presiden Suharto pada tahun 1968 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penerapan Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Hasil pembahasan dalam artikel ini berfokus pada analisis tentang peran Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, serta tantangan dan penerapannya sebagai ideologi negara. Pembahasan ini dibagi menjadi beberapa aspek penting yang mencakup perkembangan Pancasila, peranannya dalam mempersatukan bangsa, dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah dari masa ke masa.

1. Perkembangan Pancasila dalam Sejarah Indonesia: Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dan kemudian disahkan sebagai dasar negara melalui Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, Pancasila mengalami perubahan interpretasi dan penerapan yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi simbol perjuangan dan harapan bangsa untuk meraih kemerdekaan yang sejati, serta menciptakan negara yang adil dan makmur.
2. Dalam periode Orde Lama, Pancasila diinterpretasikan secara fleksibel oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai kekuatan politik dan sosial yang ada pada waktu itu, namun seringkali dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Pada masa Orde Baru, Pancasila menjadi alat legitimasi politik yang digunakan untuk memperkokoh rezim, dengan pembatasan terhadap kebebasan politik dan pluralisme. Pada masa Reformasi, Pancasila kembali ditegaskan sebagai nilai yang harus dijaga untuk mempertahankan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan demokratisasi dan globalisasi.
3. Pancasila sebagai Ideologi Negara: Pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk dasar ideologi negara Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan dalam keberagaman. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan cita-cita luhur bangsa yang diupayakan melalui kebijakan-kebijakan negara, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan negara yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

4. Meskipun demikian, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara tidak selalu berjalan mulus. Terdapat periode-periode di mana Pancasila hanya menjadi slogan atau alat politik semata, terutama ketika terjadi konsentrasi kekuasaan yang tinggi di tangan pemerintah. Hal ini memunculkan tantangan dalam menjaga kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan nyata, di mana sering kali implementasi yang terjadi tidak sesuai dengan esensi nilai-nilai tersebut.
5. Tantangan dalam Implementasi Pancasila: Salah satu tantangan utama dalam implementasi Pancasila adalah pluralitas yang ada di Indonesia, baik dalam hal suku, agama, budaya, dan ideologi. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekuatan, seringkali menjadi sumber konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus terus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak hanya sebagai doktrin negara, tetapi juga sebagai nilai hidup yang diterima secara universal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
6. Selain itu, tantangan lainnya adalah tantangan globalisasi yang dapat mengancam kedaulatan budaya dan identitas bangsa. Dalam era global ini, Indonesia menghadapi berbagai tekanan dari luar yang mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Pancasila, sebagai ideologi negara, harus mampu beradaptasi dengan tantangan ini tanpa kehilangan esensinya sebagai pilar utama dalam membentuk bangsa yang adil dan makmur.
7. Peran Pancasila dalam Pemersatuhan Bangsa: Pancasila berperan besar dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, Pancasila menjadi simbol persatuan di tengah perbedaan yang ada. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dijadikan sebagai kekuatan dalam mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur.
8. Pancasila sebagai ideologi negara mampu mengakomodasi perbedaan ini melalui sila-sila yang menekankan pada pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama, kesetaraan hak dan kewajiban di mata hukum, serta rasa solidaritas sosial yang tinggi antar sesama rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila memiliki peran sebagai alat pemersatu yang melampaui batasan-batasan suku, agama, dan budaya, serta menjadi pengikat yang kuat dalam mewujudkan keutuhan negara Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Pancasila berasal dari dua kata Bahasa Sanskerta “panca” berarti lima dan “sila” berarti prinsip atau asas. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat universal, yakni berlaku di manapun atau universal sehingga dapat diterapkan negara lain kendati negara tersebut tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, seperti dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Edi Rohani.

Berikut nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila 1 sampai 5 dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Nilai Ketuhanan

Pancasila sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung nilai ketuhanan. Dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara oleh Aa Nurdian, perwujudan nilai sila pertama Pancasila ini antara lain:

- a. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Maha sempurna.
- b. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah-Nya, sekaligus menjauhi segala larangan-Nya.
- c. Saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda.
- d. Menjaga kebebasan bersama menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Nilai Kemanusiaan

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengandung nilai kemanusiaan, yakni bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat, hak, dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, atau keturunannya. (detik.com/tag/pancasila)

Contoh penerapan nilai kemanusiaan Pancasila yaitu:

- a. Mengakui adanya harkat dan martabat manusia.
- b. Mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan.
- c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia.
- d. Tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain.

3. Nilai Persatuan

Makna sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia" adalah kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam satu wadah bernama Indonesia. Nilai kesatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan sehari-hari lewat sikap dan perilaku:

- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
- c. Menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- d. Mengakui keragaman suku dan budaya bangsa serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai Pancasila sila ke-4 adalah nilai kerakyatan, dengan manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama sebagai warga masyarakat dan warga negara. Berikut penerapan nilai kerakyatan dalam Pancasila:

- a. Mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat.
- b. Mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- c. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan.

- d. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- e. Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Nilai Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Untuk mencapainya, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya:

- a. Berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya.
- b. Merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri.
- c. Menghormati hak-hak orang lain.
- d. Memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil.
- e. Mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
- f. Mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual.

KESIMPULAN

Nyatakan kesimpulan apa yang bisa diambil dan langkah selanjutnya. Kesimpulan harus mencerminkan kesimpulan secara abstrak.

Bagian ini merangkum temuan penelitian dalam beberapa paragraf. Kesimpulan menekankan bagaimana penelitian berkontribusi pada penelitian saat ini dan praktik di lapangan, batasan penelitian, dan menunjukkan arah untuk penelitian selanjutnya.== Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang Bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia. Sejarah pancasila terbagi menjadi lima masa yaitu Masa Pra-Kemerdekaan, Masa Kemerdekaan, Masa Orde lama, Orde Baru dan Masa Revormasi.

Sejarah pancasila Asal mula Pancasila secara budaya Menurut Sunoto (1984) melalui kajian filsafat Pancasila, menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka.

Masa Orde lama Kedudukan pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan. Orde Baru Era Orde Baru dalam sejarah republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil.

Masa Revormasi Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. (1999). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos.
- Darmodiharjo, Darji. (1982). Pancasila dalam Beberapa Perspektif. Jakarta: Aries Lima
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 391–398. Retrieved from
- Latifah, L., Ngalimun, N., Andi Setiawan, M., & Haji Harun, M. (2020). Kecakapan Behavioral Dalam Proses Pembelajaran PAI Melalui Komunikasi Interpersonal: Behavioral Proficiency In The PAI Learning Process Through Interpersonal Communication. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 36–42.
- Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 2(1), 49–53. Retrieved from
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278. Retrieved from
- Ngalimun. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Samian, (2015). Pendidikan Pancasila. Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar dan Bahasa. Surakarta UMS
- Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat. <https://annur.ac.id/blog/sumber-historis-sosiologis-politis-tentang-pancasila-sebagai-sistem-filsafat.html>
- Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4664-4673.
- Tim Fakultas Filsafat UGM. (2005). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Universitas Terbuka
- Ubaedillah A & Abdul Rozak. (2003). Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Icce.Jakarta: UIN
- Winatapura, Udin. S, dkk. (2008). Buku Materi dan Pembelajaran Pkn SD. Jakarta: Universitas Terbuka
- Wulandari, Trisna. (2022). Nilai-nilai Pancasila dan Contohnya di Kehidupan Sehari-hari. [detik.com](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6257698/nilai-nilai-pancasila-dan-contohnya-di-kehidupan-sehari-hari). Diakses pada 20 Oktober 2024 dari
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6257698/nilai-nilai-pancasila-dan-contohnya-di-kehidupan-sehari-hari>.